

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara selaku penguasa, dalam rangka melaksanakan penegakan hukum berhak menjatuhkan sanksi pidana dan merupakan satu-satunya subyek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum (*ius puniendi*).¹ Kewenangan negara untuk memberikan sanksi pidana kemudian didelegasikan kepada para penegak hukum yang bekerja dalam suatu sistem yang dikenal dengan nama sistem peradilan pidana. Dengan kata lain dalam penerapan hukum pidana oleh negara, tidak akan terlepas dari adanya sistem peradilan pidana tersebut. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.² Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah terutama instansi atau badan yang dikenal dengan nama : Kepolisian; Kejaksaan; Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu “*integrated criminal justice administration*”.³

Salah satu sub sistem pendukung yang mempunyai peranan sangat penting di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana guna menegakkan hukum adalah pengadilan, karena dalam sub-sistem ini sering didengar

¹ Utrecht, 1987, *Rangkaian Sari Kuliah Hukuman Pidana I*, Pustaka Tintamas, Surabaya, hlm. 178.

² Mardjono Reksodiputro, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 84.

³ *Ibid*, hlm. 85.

ungkapan pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan,⁴ yang mana di dalamnya berisi para hakim yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam kaitannya dengan tugasnya untuk mengadili ini, Roeslan Saleh menyatakan bahwa :

“Mengadili adalah suatu pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum. Oleh karenanya mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia antara hakim dengan terdakwa kerap kali dirasakan sebagai memperlakukan suatu ketidakadilan”.⁵

Posisi hakim sangatlah istimewa, oleh karena itu dibutuhkan kemandirian baginya tanpa adanya tekanan dari pihak ataupun kekuasaan yang lain. Kemandirian hakim dalam menangani suatu perkara merupakan asas yang dapat dilihat dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim.” Undang-Undang yang dimaksud dalam Penjelasan tersebut adalah Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 Pasal 5 yang berbunyi : “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Hakim mempunyai kedudukan yang strategis dalam politik kriminal guna menanggulangi kejahatan dan menciptakan perlindungan serta

⁴ *Ibid*, hlm. 89.

⁵ Roeslan Saleh, 1979, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 22.

kesejahteraan masyarakat. Hakim adalah kongkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak, bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁶ Seorang hakim yang baik harus dapat mengukur apakah putusannya sudah mampu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, atau dengan kata lain seorang hakim ketika mengeluarkan putusan tidak hanya yuridis formal (berdasarkan undang-undang) saja, tetapi harus mempertimbangkan hukum-hukum yang hidup di tengah masyarakat agar rasa keadilan itu ada dan hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini yang dikehendaki bukanlah putusan yang membalas atau sebanding dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi adanya upaya memperbaiki apa yang telah diperbuat oleh terdakwa serta adanya rasionalitas dalam pertimbangan yang dijadikan dasar putusan terhadap perkara yang bersangkutan. Dengan demikian akan dihasilkan putusan yang rasional dan dapat diterima oleh banyak pihak.

Tugas hakim adalah mengambil atau menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Ia tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan perkara hakim tidak boleh menolak perkara yang telah diajukan kepadanya.⁷ Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif

⁶ Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 3-4.

⁷ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40.

Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana.⁸

Di samping dianutnya sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan juga maksimal khusus, (untuk masing-masing tindak pidana) juga membuka peluang bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam KUHP yang berlaku sekarang ini dipandang pula sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya.

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP dibedakan lima pidana pokok (pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda dan pidana tutupan) dan tiga pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu, dan, pengumuman putusan Hakim). Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum, serta proses jalannya pembangunan nasional. Sanksi pidana bersifat ultimum remedium atau senjata pamungkas atau dalam bahasa sederhana adalah jalan terakhir yang ditempuh, dari berbagai solusi atau alternatif solusi lainnya.

Selain sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 10 KUHP, terdapat juga sistem penjatuhan hukuman lain yaitu pidana bersyarat/pidana percobaan. Pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana, melainkan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) di mana ditetapkan

⁸ Muladi, 1995, *Hal-Hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 107.

dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah pidana dengan bersyarat. .

Pengaturan mengenai pidana bersyarat ini terdapat di dalam Pasal 14 huruf a hingga huruf f KUHP. Dalam Pasal 14a KUHP ditentukan bahwa hakim dapat menetapkan pidana dengan bersyarat dalam putusan pemidanaan, apabila:⁹

1. Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun;
2. Hakim menjatuhkan pidana kurungan (bukan kurungan pengganti denda maupun kurungan pengganti perampasan barang);
3. Hakim menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan ialah:
 - a) apabila benar-benar ternyata pembayaran denda atau perampasan barang yang ditetapkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan yang sangat bagi terpidana, dan
 - b) apabila pelaku tindak pidana yang dijatuhi denda bersyarat itu bukan berupa pelanggaran yang berhubungan dengan pendapatan negara.

Dalam penjatuhan pidana bersyarat ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim yang harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya ia dibebaskan dari pelaksanaan pidananya itu. Syarat-syarat itu dibedakan antara: syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum bersifat imperaktif, artinya bila hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat, dalam putusanya itu

⁹ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 54.

harus ditetapkan syarat umum, sedangkan syarat khusus bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan). Dalam syarat umum harus ditetapkan oleh hakim bahwa dalam tenggang waktu tertentu (masa percobaan) terpidana itu tidak boleh melakukan tindak pidana (Pasal 14c ayat (1)). Dalam syarat umum ini tampak benar sifat mendidik dalam putusan pidana dengan bersyarat, dan tidak tampak lagi rasa pembalasan sebagaimana dianut oleh teori pembalasan.¹⁰

Persyaratan pencegahan dalam pidana bersyarat yang mempunyai segi positif berupa syarat-syarat khusus yang bersifat fakultatif dan hanya dapat ditetapkan dalam pemidanaan bersyarat yang lamanya lebih dari tiga bulan pidana penjara/kurungan atas salah satu pelanggaran tertentu antara Pasal 492, 504, 505, 506, 536 KUHP, misalnya penarikan keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikanya sebagai pencarian (Pasal 506 KUHP). Syarat-syarat khusus ini berisi bermacam-macam, diantaranya dihubungkan dengan pemulihan dalam hukum adat dan harus berhubungan dengan kelakuan dari terpidana sendiri dengan pembatasan tidak boleh mengurangi kebebasan beragama, yaitu perilaku yang baik di rumah dan dalam pergaulannya di dalam masyarakat sebagaimana diputuskan oleh HR tanggal 15 maret 1926 NJ. 1926. Meskipun demikian syarat khusus itu dapat dirasakan sebagai pidana. Dalam praktek juga tidak mengurangi kebebasan politik untuk mengikuti pemilihan umum.¹¹

¹⁰ *Ibid*, hlm. 60.

¹¹ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 111.

Syarat khusus mengganti kerugian, tidak boleh ditetapkan dilekatkan apabila hakim menjatuhkan pidana denda dengan bersyarat (Pasal 14c ayat (1)) karena pada penetapan denda dengan bersyarat didasarkan pada pertimbangan hakim bahwa terpidana benar-benar sangat berat (tidak mampu) membayar denda. Sudah barang tentu terpidana dalam keadaan ekonomi yang demikian, ia lebih tidak mampu lagi jika dibebani syarat khusus untuk mengganti kerugian.¹²

Sementara itu mengenai lamanya masa percobaan itu, ditentukan dalam Pasal 14b sebagai berikut:¹³

1. Bagi kejahatan dan pelanggaran Pasal: 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun.
2. Bagi jenis pelanggaran lainnya adalah paling lama dua tahun.

Masa percobaan itu mulai berlaku sejak putusan menjadi tetap dan telah diberitahukan kepadanya menurut tata cara yang diatur dalam UU. Jika pernah dilakukan penahanan sementara, masa penahanan sementara itu tidak boleh diperhitungkan (Pasal 14b ayat (2) dan (3)).

Dalam pelaksanaan pidana dengan bersyarat jika syarat umum maupun syarat khusus tidak dapat dipenuhi, tidak secara otomatis pidana yang dijatuhkan benar-benar dilaksanakan. Untuk melaksanakan pidana setelah terbukti dilanggarnya syarat yang ditetapkan, jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan permintaan pada hakim untuk melaksanakan pidananya. Begitu juga hakim tidak wajib mengabulkan permintaan jaksa

¹² *Ibid*, hlm. 112.

¹³ Adami Chazawi, Op. Cit., hlm. 56.

Penuntut Umum untuk melaksanakan pidana yang telah diputusnya. Hakim dapat memerintahkan jaksa untuk melaksanakan putusan pembedanaan dalam hal:¹⁴

1. Jika dalam masa percobaan terpidana telah terbukti melakukan tindak pidana (melanggar syarat umum);
2. Jika dalam masa percobaan terpidana telah melanggar syarat khusus;
3. Jika sebelum lewatnya masa percobaan, terbukti terpidana telah dipidana dengan putusan yang menjadi tetap karena tindak pidana yang lain yang dilakukan sebelumnya masa percobaan berjalan;
4. Terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pembedanaan yang menjadi tetap. (Pasal 14f ayat (2)).

Manfaat penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana dengan dorongan faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya.¹⁵ Sebagaimana telah diketahui selama ini, pidana penjara memiliki kelemahan-kelemahan, diantaranya pidana penjara tidak bisa menggapai tujuan pokok dari diadakannya pembedanaan. Orang yang dipenjara tersebut, cenderung lebih jahat setelah keluar dari penjara, karena bertemu dan belajar

¹⁴ *Ibid*, hlm. 57.

¹⁵ Op. Cit. Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, hlm. 55.

dari penjahat yang lebih profesional. Pengaruh pidana penjara juga berlanjut ketika sudah bebas, stigma sebagai orang jahat yang pernah di penjara tidak akan lepas ketika dia kembali ke lingkungan masyarakat, sehingga cenderung di jauhi oleh masyarakat. Hal ini masih diperparah dengan adanya orang-orang yang memiliki kuasa dan materi, yang ketika menjalankan pidana penjara tersebut dapat keluar dari penjara secara bebas.

Ditinjau dari aspek tujuan ppidanaan, pidana bersyarat lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana dari pada pembalasan terhadap perbuatannya. Tujuan dari penjatuhan sanksi bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut pada umumnya pidana bersyarat ini lebih dikenal dengan hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Terdakwa.

Sebagaimana telah diruraikan di atas, tentang tujuan utama dari pidana bersyarat untuk memperbaiki terpidana dengan kesempatan berada di luar tembok penjara agar supaya tidak terkena pengaruh buruk dari dalam penjara. Hal ini tidak berarti pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) itu lalu tidak ada unsur pembalasannya sesuai dengan sifat daripada pidana, namun unsur mendidik dan memperbaiki ditonjolkan untuk mengimbangi kelemahan unsur pembalasan.¹⁶

Salah satu hukum yang masih hidup di sebagian masyarakat Indonesia, yakni hukum delik adat memiliki tujuan yang sama dengan apa

¹⁶ *Ibid.* hlm. 110.

yang menjadi tujuan dari pidana bersyarat tersebut. Hukum delik adat memiliki tujuan memperbaiki keseimbangan masyarakat yang terganggu akibat adanya perbuatan atau pelanggaran adat. Hal ini menunjukkan bahwa pidana bersyarat tersebut memiliki korelasi dengan apa yang menjadi tujuan dari delik adat. Hukum delik adat sendiri bukanlah merupakan hukum positif yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, karena lapangan berlakunya hukum delik adat tersebut hanya terbatas pada masyarakat adatnya saja. Walaupun begitu hukum delik adat tetap hidup di dalam masyarakat dan negara mengakui eksistensinya, hal ini tercemin di dalam Pasal 18 huruf b ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Delik adat tidak mengenal adanya pidana penjara, maka bila terjadi pelanggaran adat akan dilakukan suatu upaya-upaya tertentu untuk memperbaiki terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang terjadi seperti pengganti kerugian-kerugian immateriil dalam berbagai rupa seperti paksaan menikah dengan gadis yang dicemarkan; bayaran uang adat kepada yang terkena, yang berupa benda yang sakti, hewan peliharaan ataupun uang tunai sebagai pengganti kerugian rohani; selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib; penutup malu untuk permintaan maaf kepada keluarga korban atau kepada seluruh

masyarakat adat; berbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati; dan pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.¹⁷

Salah satu contoh kasus yang dijatuhi putusan pidana bersyarat terjadi di Kabupaten Simalungun yang dilakukan oleh terpidana Tingkos Robin Rifai Situmorang. Terpidana Tingkos Robin Rifai Situmorang didakwa melanggar pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dimana ancaman pidananya penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Adapun yang menjadi inti dari perkara ini ialah adanya penelantaran yang dilakukan terpidana terhadap saksi korban yang tidak lain adalah istri korban yakni Nora Pricilia Panggabean. Terpidana dan saksi korban menikah pada tanggal 16 November 2006 di Kota Pematangsiantar. Setelah 2 hari terpidana dan saksi korban menikah, terpidana menyuruh saksi korban untuk pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Surabaya, dan saksi korban berada di Surabaya sekitar 3 (tiga) bulan. Pada tanggal 20 Februari 2007 saksi korban kembali pulang ke Pematangsiantar untuk tinggal kembali bersama suaminya atau terpidana. Pada saat saksi korban hamil 7 bulan sekitar pertengahan bulan September 2007, terpidana kembali menyuruh saksi korban agar kembali ke rumah orang tuanya, dengan alasan agar ketika melahirkan saksi korban dekat dengan orang tuanya di Surabaya.

¹⁷ I Made Widnyana, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung, PT Eresco, hlm. 9.

Setelah melahirkan pada bulan November 2007, tepatnya bulan Maret 2008, saksi korban kembali lagi ke Pematangsiantar dan tinggal bersama terpidana kembali. Tanggal 23 November 2008, anak saksi korban dan terpidana yang berusia satu tahun tiba-tiba meninggal dunia. Sejak kejadian tersebut terpidana jarang pulang ke rumah dan jarang memberikan nafkah lahir batin. Oleh karena terpidana tidak pernah pulang, saksi korban mencari terpidana dan ketika berjumpa terpidana tidak ada memberikan uang kepada saksi korban. Pada bulan Februari 2009, saksi korban jatuh sakit dan selama 6 bulan terpidana tidak memberikan nafkah lahir batin bahkan membiarkan saksi korban sendirian dalam keadaan sakit, sehingga saksi korban kembali lagi kepada orang tuanya di Surabaya. Sebagai seorang suami yang telah menikahinya secara sah baik adat maupun agama, seharusnya terpidana merawat dan memperdulikannya.

Sewaktu di Surabaya, terpidana hanya sekali mengirimkan uang kepada saksi korban yakni sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Tanggal 10 Mei 2010, saksi korban kembali lagi ke Pematangsiantar dan bertemu dengan terpidana, untuk kemudian tinggal bersama di rumah kakak saksi korban. Bulan Desember 2012, terpidana memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi korban, dengan maksud agar saksi korban kembali ke rumah orang tuanya di Surabaya, akan tetapi saksi korban tidak mau. Semenjak bulan Februari 2013 ketika saksi korban hamil anak ketiga hingga saat anak korban berumur 4 bulan, terpidana tidak pernah pulang lagi ke rumah dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun

batin. Oleh karena itu, korban bersama kerabat adatnya melaporkan terpidana ke polisi, dan berlanjut hingga ke pengadilan. Di Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa perkara ini, terpidana diputus secara sah dan meyakinkan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini penelantaran oleh Majelis Hakim dan divonis 6 bulan penjara. Akan tetapi, di dalam amar putusan tersebut, terpidana tidak harus menjalankan pidananya, dan hanya dikenakan pidana bersyarat/pidana percobaan selama 1 tahun. Satu hal yang menarik dari kasus ini, adanya putusan peradilan adat yang dijatuhkan kepada terpidana berupa pembayaran uang kepada kerabat korban dan korban serta pelarangan mengikuti kegiatan adat bagi terpidana untuk waktu tertentu ketika proses persidangan tersebut sedang berlangsung.

Dari latar belakang di atas tersebut, penulis tertarik untuk menguraikan lebih jauh mengenai pejatuhan pidana bersyarat tersebut, sehingga penulis akan membahas lebih dalam penelitian yang berjudul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT.” (STUDI KASUS PUTUSAN 128/Pid.Sus/2015/ PN.Sim)**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang timbul dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat tersebut, mempertimbangkan putusan peradilan adat yang sudah dijatuhkan terlebih dahulu ?

2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat tersebut telah sesuai dengan tujuan pembedaan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan putusan peradilan adat terhadap putusan pidana bersyarat tersebut.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat dengan tujuan pembedaan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana pada umumnya dan sumbangan pemikiran tentang hukum adat pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran :

- a) Bagi masyarakat

Sebagai pengetahuan agar masyarakat lebih mengerti dan memahami mengenai bagaimana aturan-aturan mengenai putusan pidana bersyarat.

- b) Bagi Hakim

Sebagai referensi dan informasi bagi para Hakim, dalam proses penjatuhan putusan yang terkait dengan pidana bersyarat dan peradilan adat.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian dengan judul “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT.” (Studi Kasus Putusan 128/Pid.Sus/2015/ PN.Sim) adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri. Berdasarkan penelusuran baik melalui media internet maupun pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, belum ada karya ilmiah dengan judul dan lokasi penelitian yang sama seperti yang diteliti sehingga penelitian ini adalah karya asli penulis dan bukan hasil duplikasi atau plagiasi dari karya atau hasil penelitian lain. Beberapa penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pembanding bagi peneliti ialah :

1. Siska Listiana Dewi, Nomor Mahasiswa 030508490, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2010, menulis penelitian dengan judul “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Pidana”. Rumusan masalah yang diajukan ialah faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memperoleh data tentang faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan putusan Hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana. Hasil dari penelitian tersebut ialah faktornya ialah

karena tersedianya bagi Hakim jenis berat ringannya pidana dalam pengancaman pidana untuk mendapatkan pidana yang paling tepat.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada obyek penelitian yang berupa putusan Hakim yang menyebabkan adanya disparitas pidana; dan tempat penelitiannya yang berada di Yogyakarta.

2. Penelitian Yohanes Rafael S.I. Keraf, Nomor Mahasiswa 050509240, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2010, menulis penelitian dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Kematian”. Rumusan masalah yang diajukan Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data tentang dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Hasil dari penelitian tersebut ialah dalam memutus perkara tersebut, Hakim memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan perbuatan pidana. Pertimbangan hakim tersebut terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada obyek penelitiannya yang merupakan putusan hakim dalam perkara penganiayaan

berat yang mengakibatkan kematian; dan tempat penelitiannya yang berada di Yogyakarta.

3. Penelitian I Ketut Hasta Dana, Nomor Mahasiswa 1006789242, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Tahun 2012, menulis penelitian dengan judul “Kajian Terhadap Pidana Bersyarat (*Voorwaardelijke Veroordeling*) dalam Tindak Pidana Korupsi.” Rumusan masalah yang diajukan ialah:

- a) Apakah yang melatar belakangi atau menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) dalam tindak pidana korupsi ?
- b) Apakah penjatuhan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) dalam tindak pidana korupsi oleh hakim tidak bertentangan dengan Undang-Undang?
- c) Apakah putusan hakim di tingkat Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) pada tindak pidana korupsi dapat dijadikan yurisprudensi atau tolok ukur bagi para hakim di tingkat bawahnya untuk menjatuhkan pidana bersyarat?

Tujuan penelitiannya adalah :

- a) Untuk mengetahui apakah yang melatar belakangi atau menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) terhadap tindak pidana korupsi.
- b) Untuk mengetahui apakah penjatuhan putusan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) oleh hakim dalam tindak pidana korupsi bertentangan dengan Undang-Undang.

- c) Untuk mengetahui apakah putusan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) dalam tindak pidana korupsi oleh hakim di tingkat Mahkamah Agung dapat dijadikan sebagai yurisprudensi atau tolok ukur bagi para hakim di tingkat bawahnya untuk menjatuhkan putusan pidana bersyarat?

Hasil dari penelitian tersebut ialah :

- a) Pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk menerapkan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi diantaranya adalah pertimbangan yang bersifat sosiologis / non yuridis yang meliputi :
- 1) Nilai kerugian negara yang ditimbulkan oleh terdakwa sangat kecil;
 - 2) Terdakwa bersedia untuk mengembalikan kerugian negara;
 - 3) Dampak dari tindak pidana tersebut tidak merugikan masyarakat;
 - 4) Terdakwa tidak menikmati hasil korupsi tersebut;
 - 5) Tidak ada motivasi terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;
 - 6) Rasa keadilan dan kemanusiaan bagi terdakwa;
- b) Selama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih berlaku, maka penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan undang-undang.
- c) Putusan berupa pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi bukan merupakan yurisprudensi, karena sistim pemidanaan di Indonesia tidak mengikuti "*asas stare decisis*" yang mewajibkan hakim terikat dengan yurisprudensi.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada obyek penelitiannya yang berupa putusan pidana bersyarat yang dileluarkan Hakim terhadap tindak pidana korupsi; dan tempat penelitiannya yang berada di Jakarta.

F. BATASAN KONSEP

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti dengan judul “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT.” (STUDI KASUS PUTUSAN 128/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Sim), maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut :

1. Pengertian Pertimbangan dapat diartikan sebagai suatu pemikiran atau pendapat dan/ atau keputusan yang dapat diutarakan dalam bentuk nasihat. Pengertian dari mempertimbangkan yaitu memikirkan baik-baik untuk menentukan suatu keputusan, dalam hal ini pertimbangan yang dilakukan oleh seorang hakim dapat dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain sebelum putusan dijatuhkan oleh hakim maka perlu dilakukan komparasi dengan beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur secara tegas mengenai perbuatan pidana tersebut dengan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Pengertian Putusan Hakim yaitu suatu ketentuan yang terlebih dahulu sudah dipertimbangkan, difikirkan dan telah disetujui serta diterapkan oleh hakim. Dengan kata lain, pernyataan hakim di sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan; bebas; atau lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁸

¹⁸ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, 2008, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 126.

3. Pidana Bersyarat adalah suatu pidana dimana si terpidana tidak menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma (*law in the back*) dan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus serta memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Dalam penelitian ini dilakukan abstraksi untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat.

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian hukum normatif maka sumber data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan sumber data utama.

Data yang digunakan dibedakan menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang kekuatan berlakunya mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan cara pengumpulan data sebagai berikut :

- a) Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, memahami, mempelajari putusan hakim 128/Pid.Sus/2015/PN.Sim; buku-buku; literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dengan berpedoman pada putusan pidana bersyarat.

- b) Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan. Wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan cara tanya jawab dengan para narasumber, dalam ini anggota majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara 128/Pid.Sus/2015/PN.Sim; dalam hal ini Hakim Justiar Ronal S.H.

4. Metode Analisis

Proses penalaran dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu bertolak dari proposisi khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat umum.

H. SISTEMATIKA SKRIPSI

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan kerangka dalam penulisan hukum. Adapun kerangka penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab, ditambah lampiran-lampiran daftar pustaka yang disusun dengan kerangka sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II. PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai putusan hakim dan pertimbangannya; menguraikan tentang pidana bersyarat; menguraikan tentang delik adat; serta analisis keputusan hakim tentang pidana bersyarat. Untuk mengetahui lebih jelas dan konkrit, maka dilakukan penelitian dengan meneliti secara langsung ke Kabupaten Simalungun, khususnya Pengadilan Negeri Simalungun, serta menilai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berlaku.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan permasalahan yang diteliti.